



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Mewujudkan Perkotaan dan Permukiman Inklusif di Indonesia

oleh:

Dr. Ir. Danis H. Sumadilaga, M. Eng.Sc
Direktur Jenderal Cipta Karya

Bersama dengan :

Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Disampaikan pada Acara:

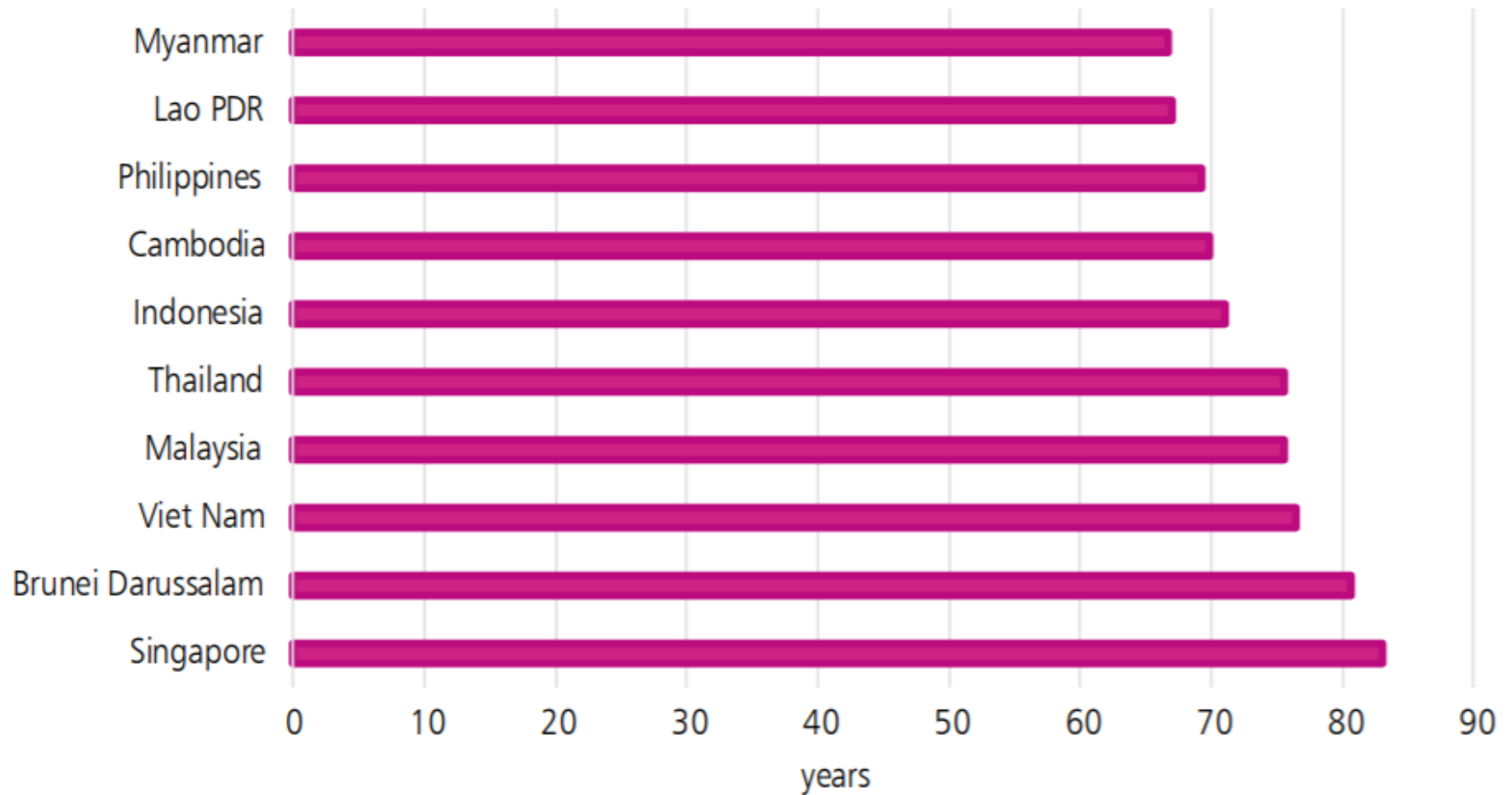
High-level Rountable on “Asian Cities: Fostering Growth and Inclusion”

This is not an ADB material. The views expressed in this document are the views of the author/s and/or their organizations and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy and/or completeness of the material's contents, and accepts no responsibility for any direct or indirect consequence of their use or reliance, whether wholly or partially. Please feel free to contact the authors directly should you have queries.

1

Tantangan Global dan Regional

ANGKA HARAPAN HIDUP, NEGARA-NEGARA ASEAN 2005-2017 (TAHUN)



Sumber: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

AKSESIBILITAS AMAN AIR MINUM, NEGARA-NEGARA ASEAN 2005-2017 (%)



Sumber: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

AKSESIBILITAS SANITASI YANG LAYAK, NEGARA-NEGARA ASEAN 2005-2017 (%)



Sumber: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

POPULASI HIDUP DI BAWAH GARIS KEMISKINAN, NEGARA-NEGARA ASEAN 2005-2016 (%)



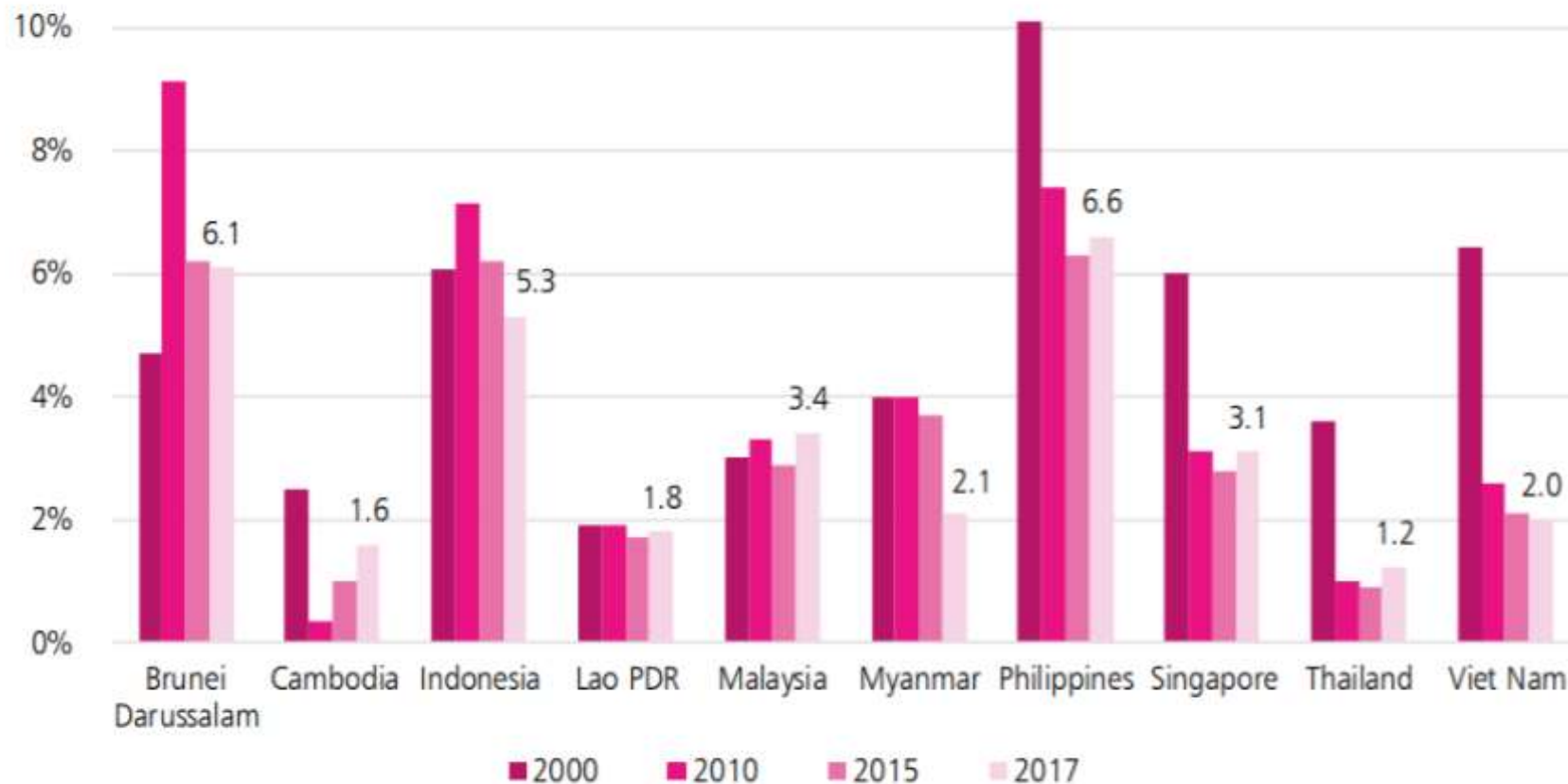
Sumber: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, NEGARA-NEGARA ASEAN 2005-2017



Sumber: UNDP, Human Development Report Series

ANGKA PENGANGGURAN, NEGARA-NEGARA ASEAN 2005-2017 (%)



Sumber: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

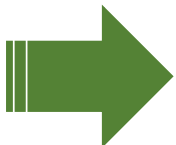
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, NEGARA-NEGARA ASEAN 2005-2017 (RIBU)



Sumber: ASEAN Secretariat, ASEANstats database

Dunia yang semakin **Mengkota**

- ❑ Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa, **lebih dari setengah populasi penduduk di dunia sudah tinggal di perkotaan** dan diprediksi akan semakin bertambah hingga mencapai **66% di tahun 2050**.
- ❑ Indonesia juga semakin “urbanized”. Bahkan akan mencapai angka 66% lebih cepat:

54%  **66%**
2015 2035

- ❑ Urbanisasi merupakan proses yang **tidak dapat dicegah**, namun dapat **dimitigasi** dan **dimanfaatkan** secara maksimal



Urbanisasi Asia

Dominasi populasi raksasa

Asia memiliki lima negara sedang berkembang dengan lebih dari 100 juta orang (Cina, India, Bangladesh, Pakistan, dan Indonesia)

Peningkatan urban yang besar

tantangan luar biasa dalam penyediaan infrastruktur, manajemen lingkungan, dan pekerjaan

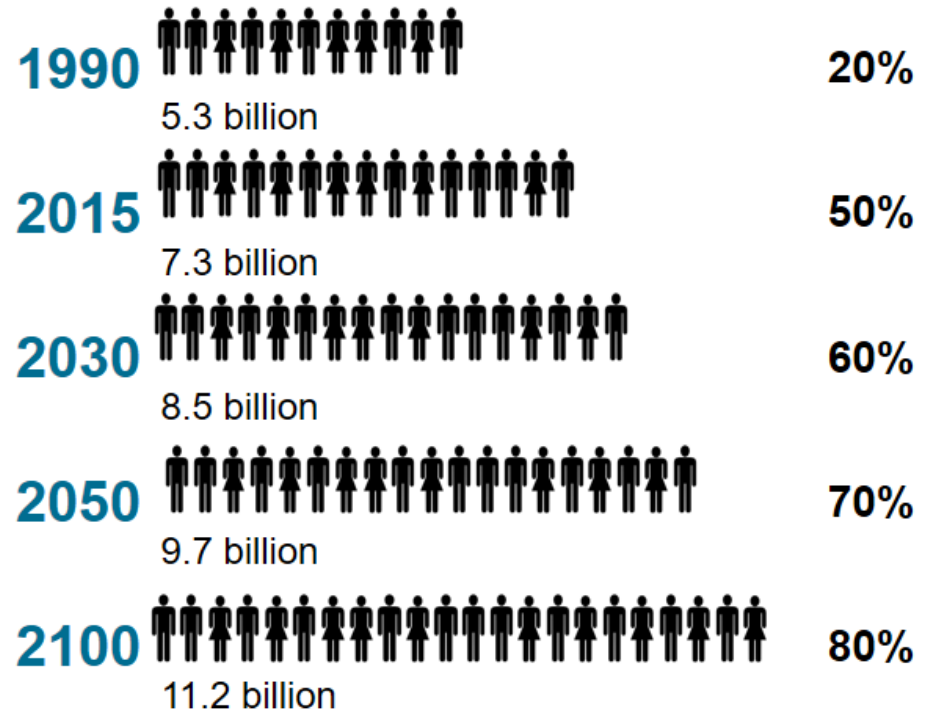
Keunggulan kota besar

Pada 2015, 16 dari 24 kota besar dunia (kota dengan lebih dari 10 juta orang) akan berlokasi di Asia, menurut Prospek Urbanisasi Dunia PBB.

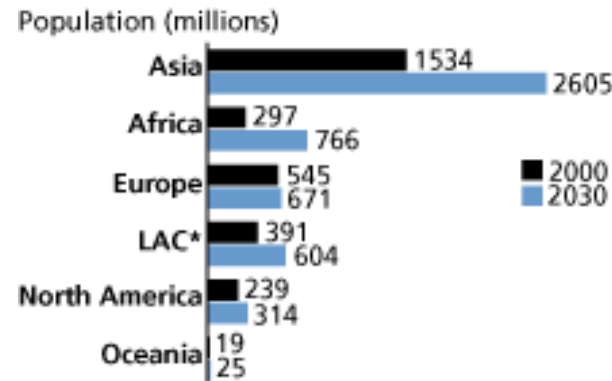
Globalisasi yang tidak merata

Selama dua dekade terakhir, Asia telah melampaui seluruh dunia yang sedang berkembang dalam hal integrasi ke dalam ekonomi global, menciptakan peluang yang lebih besar untuk pembangunan perkotaan.

World Population & Urbanization



Source: United Nations



Urbanisasi sebagai Peluang

- ❑ Pengalaman menunjukkan bahwa antara **pembangunan ekonomi dan urbanisasi** telah terjalin dengan baik.
- ❑ **Kota** adalah lingkungan penting dan kumpulan kelembagaan untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, kota-kota mengalami tingkat **peningkatan populasi alami** yang lebih rendah daripada daerah pedesaan, **pendapatan rumah tangga** rata-rata lebih tinggi, dan **tingkat pendidikan** jauh di atas yang di daerah pedesaan.
- ❑ Dengan demikian, kota juga dapat dilihat sebagai **tempat peluang**, di mana **kebutuhan utama** adalah manajemen dan penyediaan layanan yang efektif, penciptaan peluang ekonomi, dan penyediaan lingkungan yang aman dan sehat.

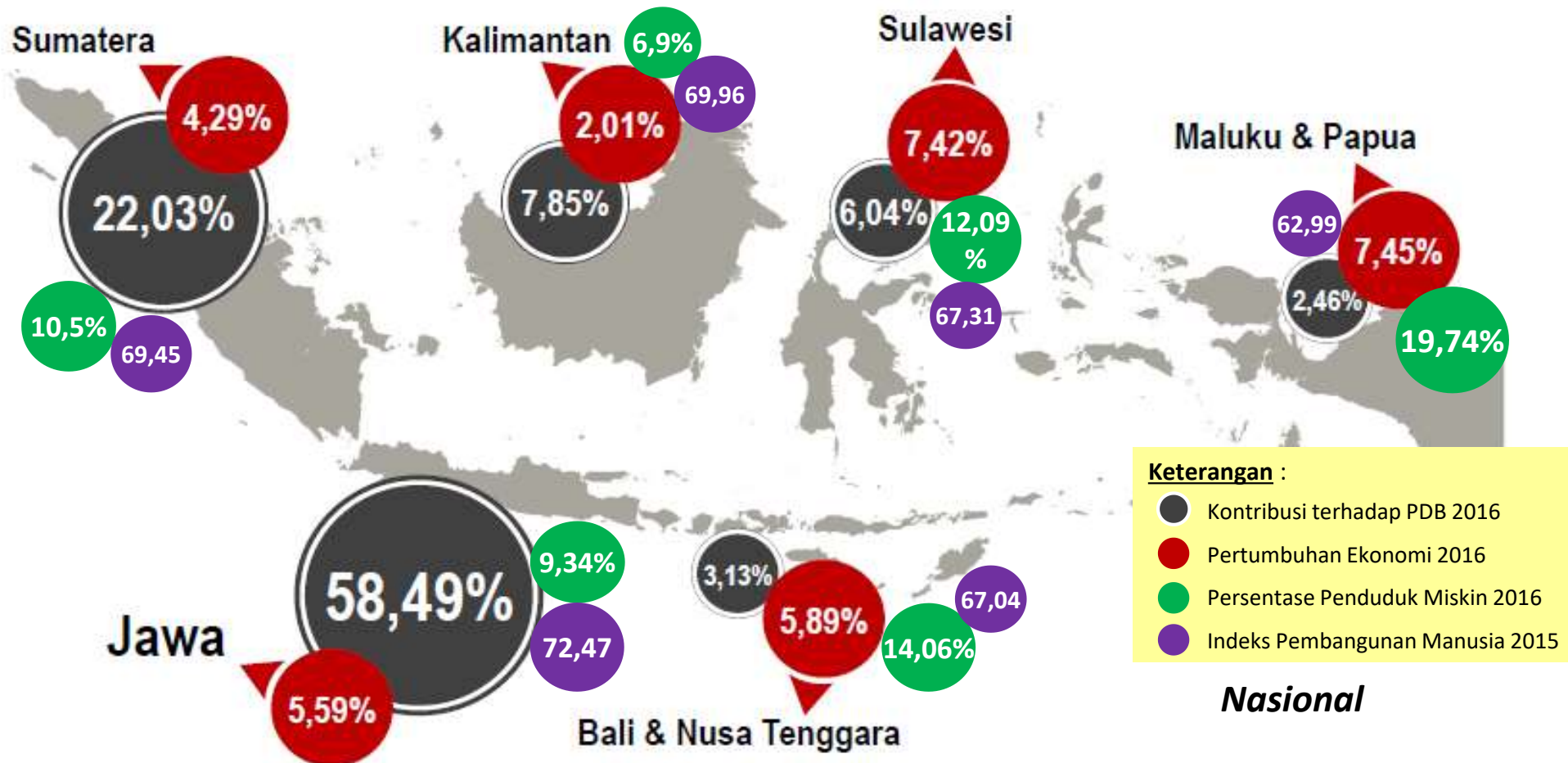


2

Tantangan Nasional

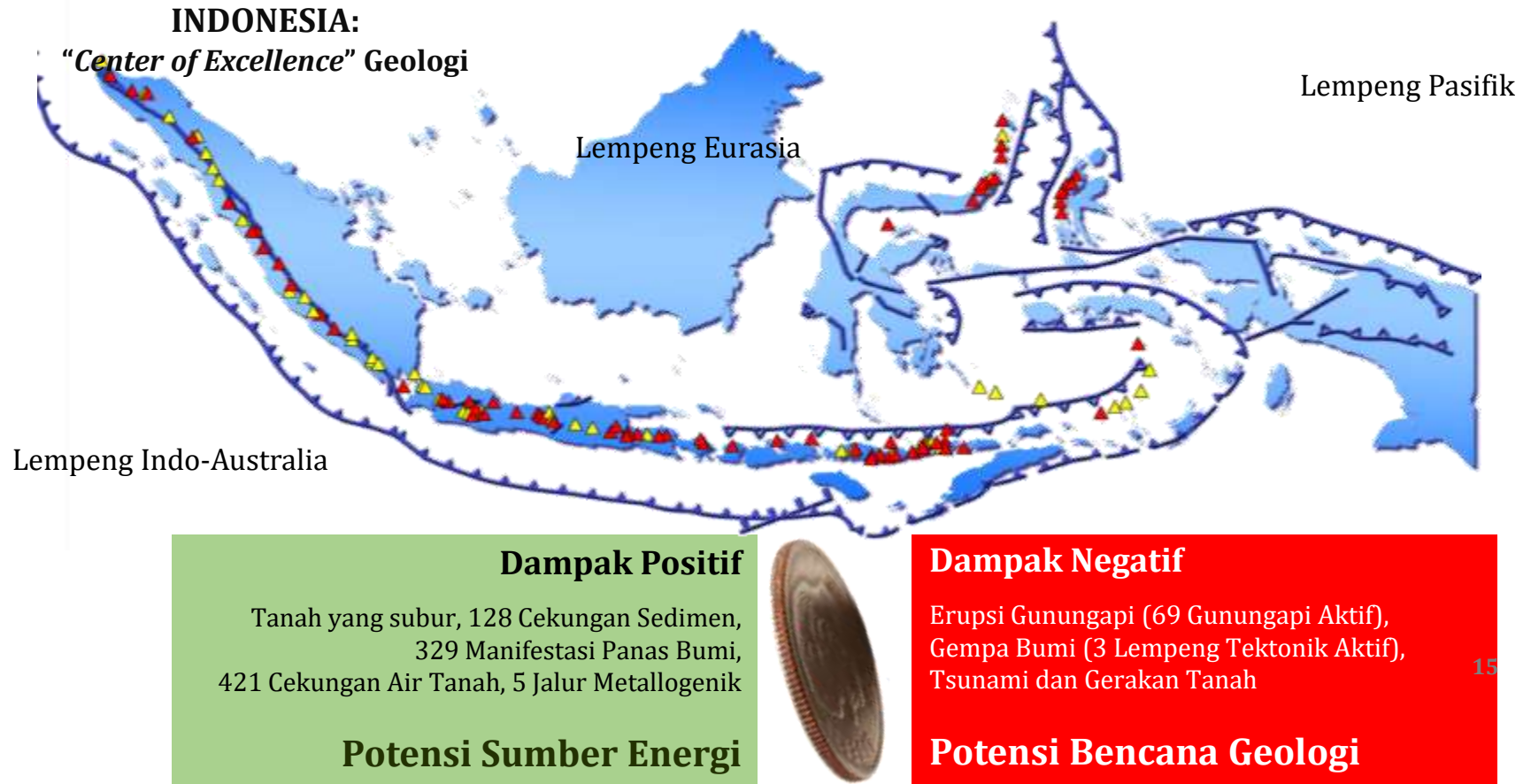
Tingginya Disparitas Antar Wilayah

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2016 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,49 persen.



Sumber: Data Sosial Ekonomi Strategis BPS (April 2017)

Tantangan Kondisi Alam (*Ring of Fire*)

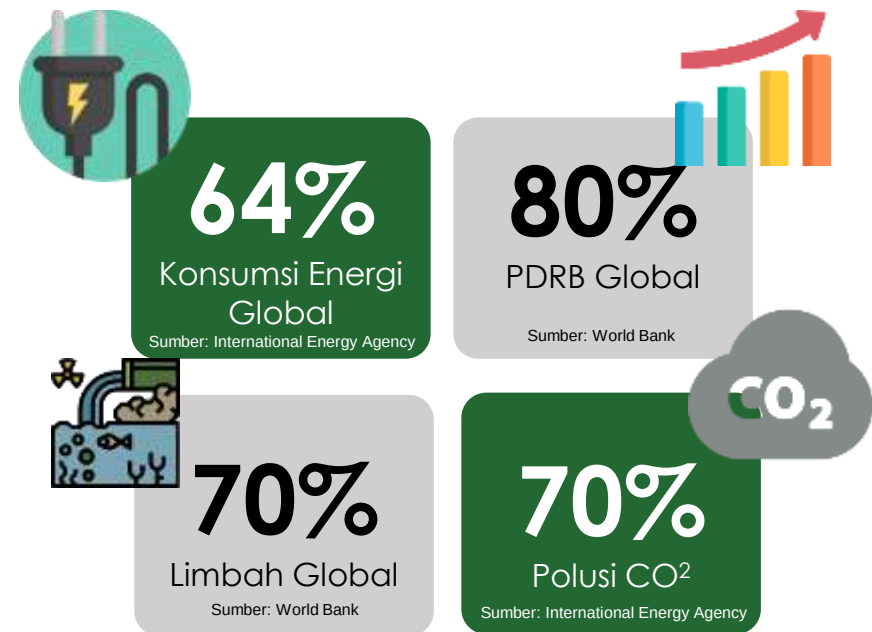


Sumber : Pusat Vulkanologi Dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi, 2018

Kondisi Perkotaan Indonesia



KONTRIBUSI PERKOTAAN



Bangunan Gedung menghabiskan lebih dari **1/3 sumber daya dunia** untuk konstruksinya dan menggunakan **40% dari total energi global**. Pada tahun 2030, diperkirakan **1/3 total emisi CO₂ dunia** berasal dari Bangunan Gedung*.

*)Sumber: IPCC, Fourth Assessment Report on Climate Change 2007

KONDISI PERMUKIMAN DI INDONESIA

Pertumbuhan Kota yang **tidak terkendali**: keterbatasan lahan sehingga menimbulkan **permukiman kumuh**

Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman **untuk memenuhi kebutuhan** penduduk

Permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas sangat rentan terjadi di perkotaan

Masalah Umum Permukiman dan Perkotaan

Dalam penyediaan infrastruktur permukiman, masih terdapat beberapa **tantangan** yang harus diselesaikan terkait dengan air bersih, energi, telekomunikasi, transportasi, bangunan serta pengelolaan sampah dan air limbah.



Belum semua warga punya akses ke air bersih



Sampah belum terkelola baik



Bangunan boros energi



Kemacetan lalu lintas

CAPAIAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

TAHUN 2015-2019

TARGET

sesuai dengan
Rencana Strategis DJCK
tahun 2015 – 2019
(awal)



PEMBANGUNAN SPAM
34.319 lt/dt



PENANGANAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH
38.431 Ha



SANITASI DAN PERSAMPAHAN
12.163.334 KK

2015

7.349 lt/dt

3.140 Ha

3.863.130 KK

2016

3.780 lt/dt

2.463 Ha

983.250 KK

2017

5.873 lt/dt

5.961,8 Ha

2.670.121 KK

2018

4.497 lt/dt

11.842 Ha

2.269.668 KK

**CAPAIAN
2015-2018**

21.499 lt/dt

23.406,8 Ha

9.786.169 KK

2019

3.122 lt/dt*

888 Ha*

416.680 KK*

Keterangan :

* : Target Potensi (didasarkan PK TA 2019)

3

Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman di Indonesia

Arah Kebijakan

Amanat Internasional dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman



Arah Kebijakan

Kebijakan Nasional dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman



Bangunan Gedung

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002



Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008



Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011



Rumah Susun

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011



Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Nomor 36/2005



Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015



Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016



Wilayah Pengembangan Strategis

Tertuang di dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015

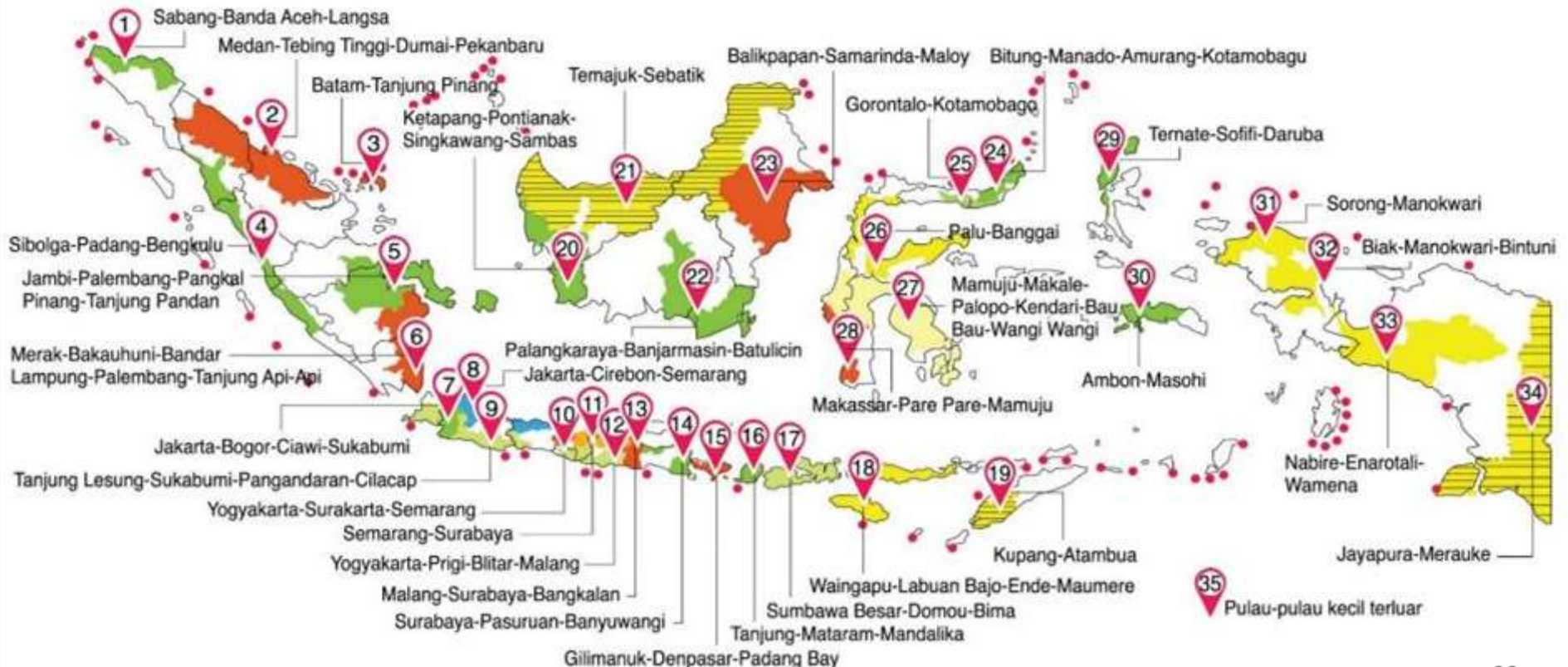
35 Wilayah Pengembangan Strategis

Tertuang di dalam Permen PUPR No 13.1/PRT/M/2015

35

Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

-  Pulau-Pulau Kecil Terluar
-  WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu
-  WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang
-  WPS Pusat Pertumbuhan Baru
-  WPS Perbatasan Negara



Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

VISI INDONESIA DALAM RPJPN 2005-2025

“INDONESIA YANG MANDIRI, ADIL, MAJU, DAN MAKMUR”

2005-2009

- o Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif termasuk memperbaiki infrastruktur
- o Percepatan pembangunan infrastruktur didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan

2010-2014

- o Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha
- o Pengembangan jaringan infrastruktur transportasi serta pos dan telematika
- o Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan khususnya bio energi, panas bumi, tenaga air, angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan
- o **Pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman**

2015-2019

- o Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang
- o Berkembangnya jaringan transportasi
- o Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien
- o Mulai dimanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik
- o Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya **penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar**
- o **Pengembangan infrastruktur perdesaan mendukung pertanian**
- o Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang
- o **Mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh**

2020-2024

- o Kondisi maju dan sejahtera makin terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI
- o Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga
- o Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan **sarana dan prasarana pendukung bagi seluruh masyarakat** yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga **terwujud kota tanpa permukiman kumuh**

Arah Kebijakan

Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2030



**100% Hunian Cerdas
di Wilayah Perkotaan
(Urban Smart Living)**

2017-2019

78% Air Minum
27.000 Ha Kumuh
75% Sanitasi
Anggaran Rp. 45 T

2020-2024

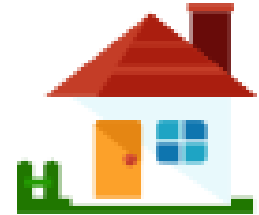
88% Air Minum
17.000 Ha Kumuh
85% Sanitasi
Anggaran Rp. 128 T

2025-2030

100% Air Minum
0 Ha Kumuh
100% Sanitasi
Anggaran Rp. 170 T

Permukiman Layak Huni (Livable)

100% Akses Air Minum
0% Permukiman Kumuh
100% Akses Sanitasi



Permukiman Tahan Bencana



Penerapan Bangunan Gedung Hijau



Permukiman yang Menerapkan Teknologi Informasi



Strategi Pelaksanaan

Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman

	PERKOTAAN	PERDESAAN
MAJU	KUADRAN I Mendorong Daerah untuk Memafaatkan APBD	KUADRAN II Mekanisme Pemberdayaan
TERTINGGAL	KUADRAN III Mekanisme Pembangunan/ Pemberdayaan	KUADRAN IV TURBINLAKWAS

KETERANGAN:

- ☐ Fokus penanganan terbagi menjadi **Permukiman Perkotaan (U)** dan **Permukiman Perdesaan (R)**.
- ☐ Kemampuan ekonomi dalam pembangunan Kab/Kota-nya dibagi menjadi **Maju (M)** dan **Tertinggal (T)**.
- ☐ Kebijakan penanganan:
 - a) **Kuadran I** (Perkotaan Maju)
intervensi dilakukan dengan NSPK/Pembinaan
 - b) **Kuadran II** (Perdesaan Maju)
Intervensi dilakukan dengan NSPK/Pembinaan
 - c) **Kuadran III** (Perkotaan Tertinggal)
Intervensi dilakukan dengan Pelaksanaan Fisik dan Pemberdayaan
 - d) **Kuadran IV** (Perdesaan Tertinggal)
intervensi dilakukan dengan TURBINLAKWAS.

SASARAN STRATEGIS

berdasarkan Visium Kementerian PUPR 2030

Target
Pembangunan
Infrastruktur
Permukiman
Tahun 2020-2024
dalam rangka
terwujudnya Hunian
Cerdas



Meningkatkan
persentase cakupan
air minum menjadi
88%



Menurunkan luas
permukiman kumuh
perkotaan menjadi
17.000 Ha

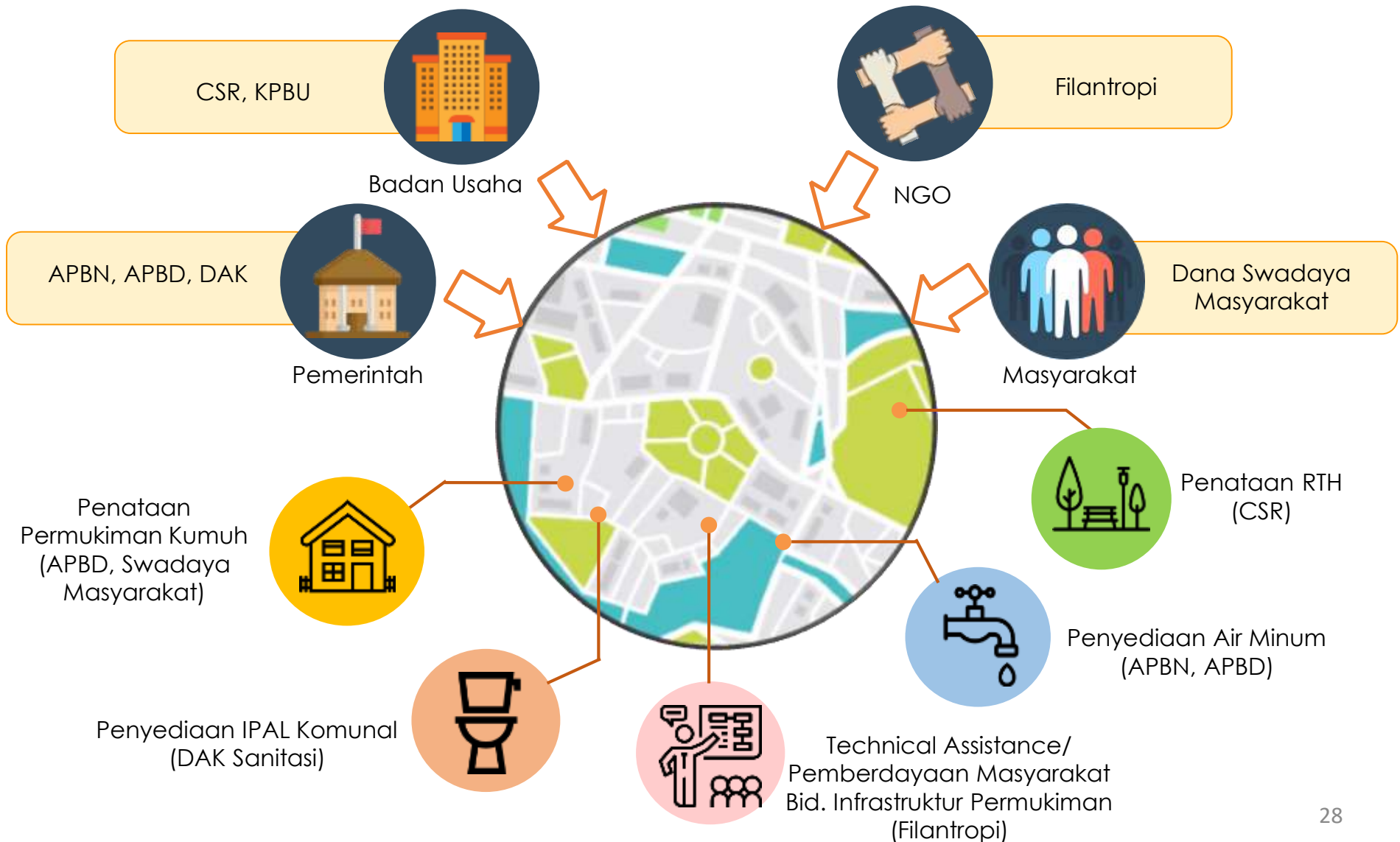


Meningkatkan
persentase
pemenuhan sanitasi
layak menjadi 85%

Sumber: Permen PUPR Nomor 26/PRT/M/2017 tentang **PANDUAN
PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Arah Pembangunan ke Depan

Penguatan Keterpaduan Program dan Sumber Pendanaan
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman



Hal yang Perlu Diperhatikan

dalam Mewujudkan Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan

Peningkatan Kapasitas

(Pemetaan, pelatihan, pembinaan pengelolaan)

Penyiapan Data Akurat

(Kepadatan, Pendapatan, Status Sosial Penduduk, Pemilikan lahan)

Pembangunan Sosial

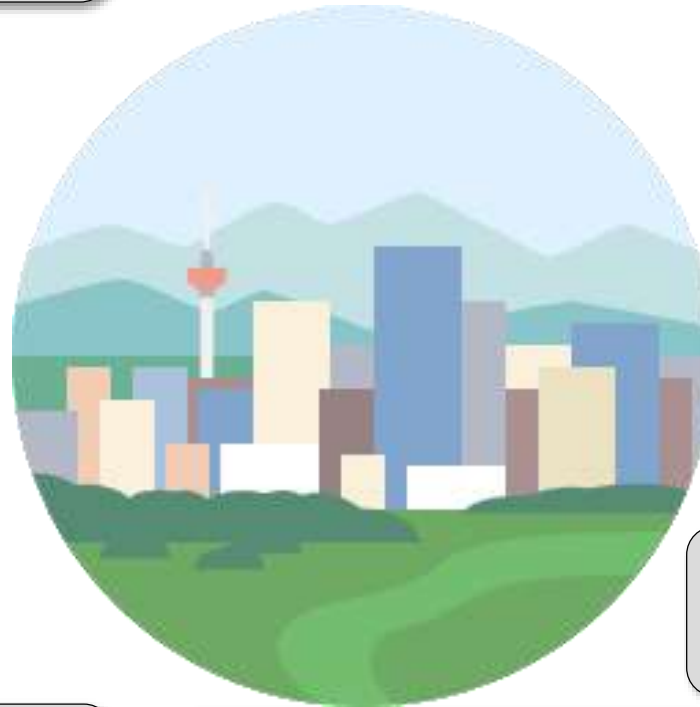
(Pendidikan, Kesehatan, Perubahan kebiasaan dan perilaku)

Pemerintahan dan Kelembagaan

(Pelibatan kelompok masyarakat, *gender sensitive approach*, dan mendorong bottom-up approach)

Pelaksanaan Strategi Pemasaran Sosial

(untuk memastikan informasi penting tentang kegiatan mencapai semua orang)



Pembangunan Fisik dan Lingkungan

(Penataan dan sertifikasi lahan, air minum, sanitasi, drainase, bahaya kebakaran, persampahan, jalan lingkungan, drainase, rumah susun yang terintegrasi rencana kota).

Kearifan Lokal

(Pembangunan infrastruktur permukiman memperhatikan kearifan lokal)

Pembangunan Ekonomi

(Pelatihan kewirausahaan, Pinjaman Modal Usaha)

Pembiayaan Pembangunan

(Mencari peluang pembiayaan dari non-dana pemerintah)

4

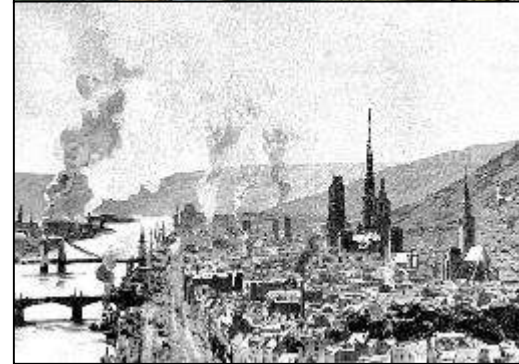
Mewujudkan Perkotaan dan Permukiman Inklusif

Peran Teknologi

Perkembangan pengetahuan dan teknologi selalu berpengaruh terhadap cara kita bermukim

Sejak pertamakali terbentuknya kota, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berperan:

- ❖ **Revolusi pertanian** → munculnya kota-kota pertanian dan pusat perdagangan tradisional
- ❖ **Revolusi industri** → munculnya kota-kota industri, yang kemudian berakibat pada pemisahan fungsi tinggal dan fungsi kerja dalam tata-ruang kota
- ❖ **Revolusi digital** → munculnya kota-kota cerdas



Hampir semua kota di dunia memanfaatkan teknologi dalam berbagai tingkatan. **"Smart city" memanfaatkan teknologi digital secara maksimal.**

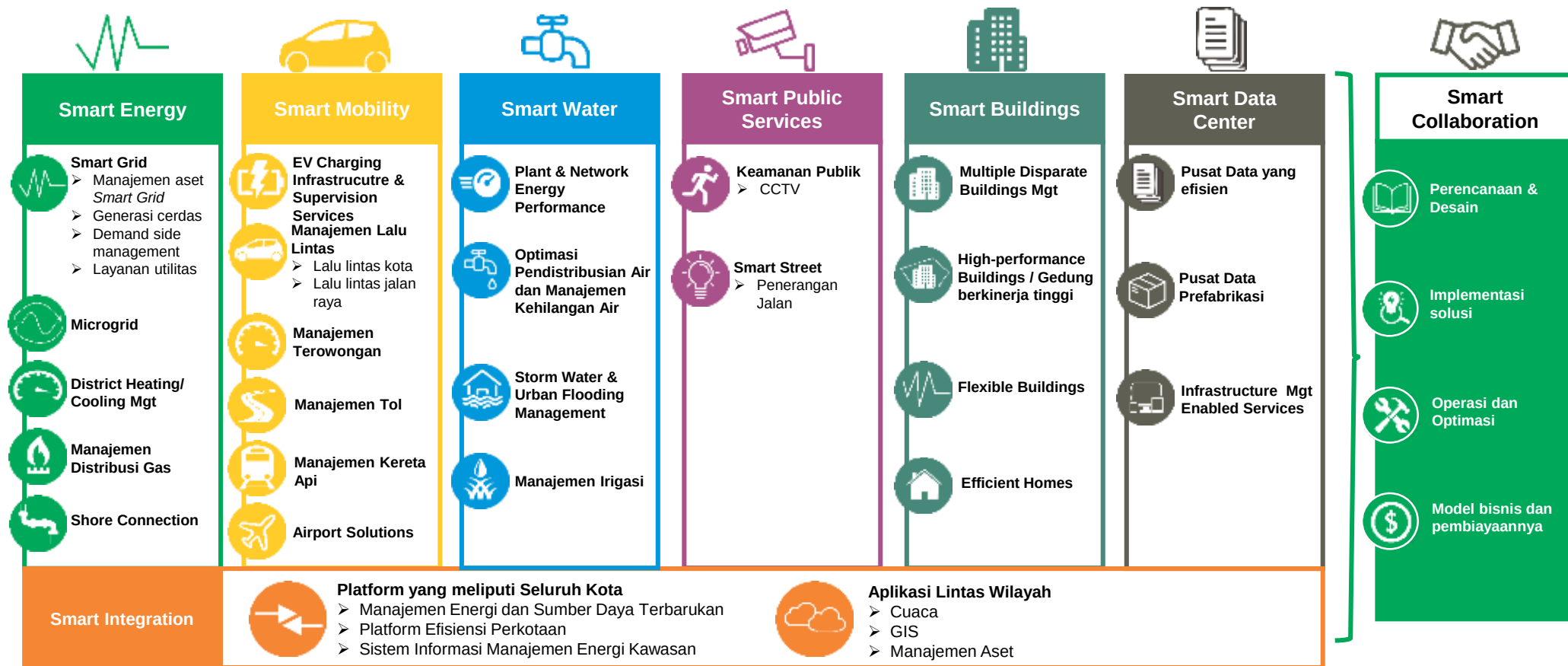
Memahami KOTA CERDAS

- Pemahaman yang "**spesifik**" mendefinisikan "smart city" sebagai kota yang **memanfaatkan kemajuan teknologi digital atau teknologi informasi-komunikasi** untuk **meningkatkan kinerja kota** (bekerjanya fungsi-fungsi kota sebagai tempat tinggal, bekerja, berinteraksi sosial, lalu-lalang, berekreasi dll.)
- Pemahaman yang lebih "**luas**" menjangkau **berbagai cara cerdas** untuk mengatasi masalah/mencapai tujuan-tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan ("triple bottom-line" atau SDGs)



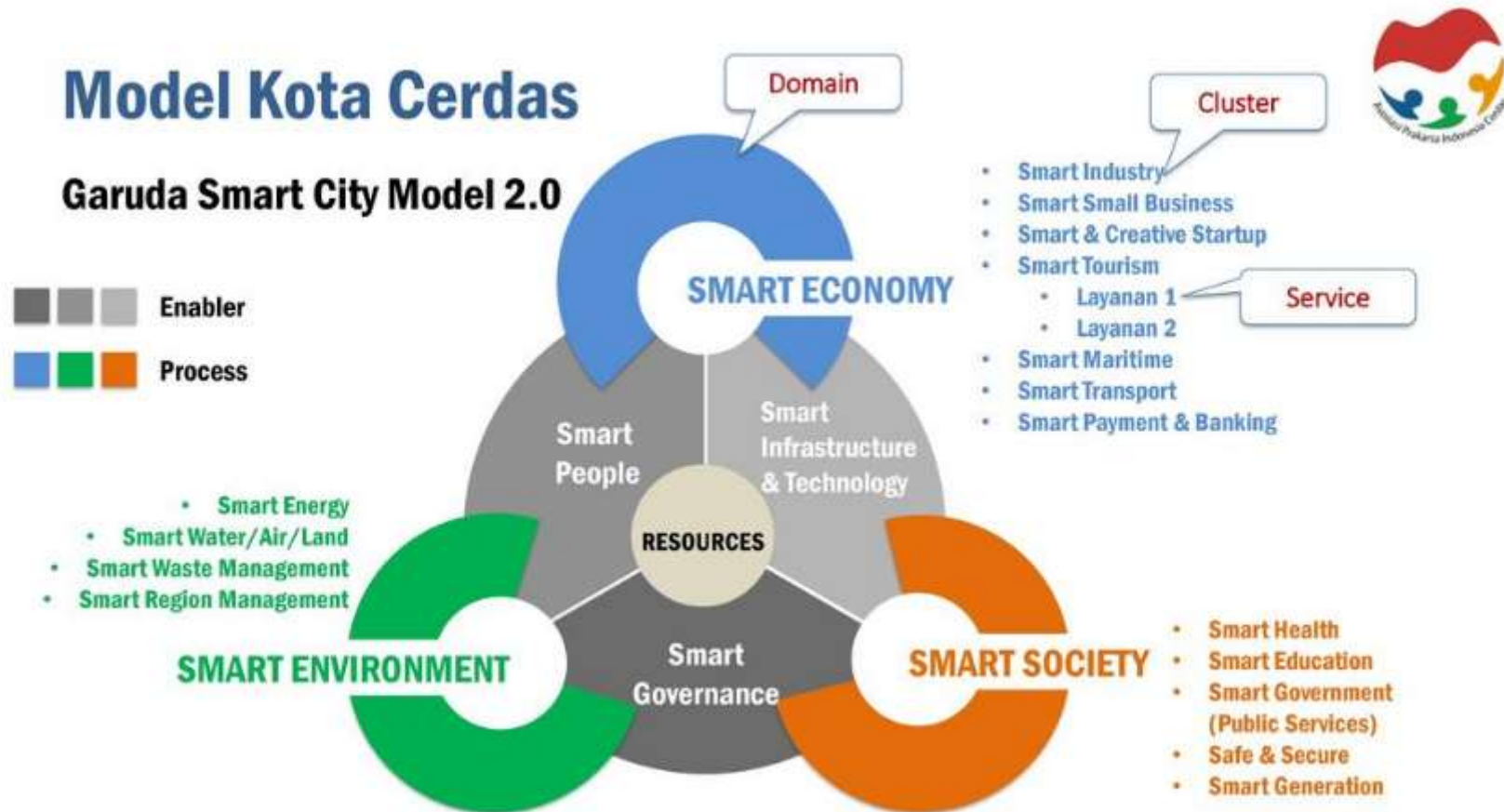
Memahami **KOMPONEN** Kota Cerdas

Terdapat banyak variasi tentang apa saja yang harus menjadi komponen sebuah “*smart city*”



Memahami Komponen KOTA CERDAS INDONESIA (1)

Berbagai pihak di Indonesia pun mengeluarkan versinya masing-masing (a.l. Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas yang dipelopori oleh Prof. Suhono)

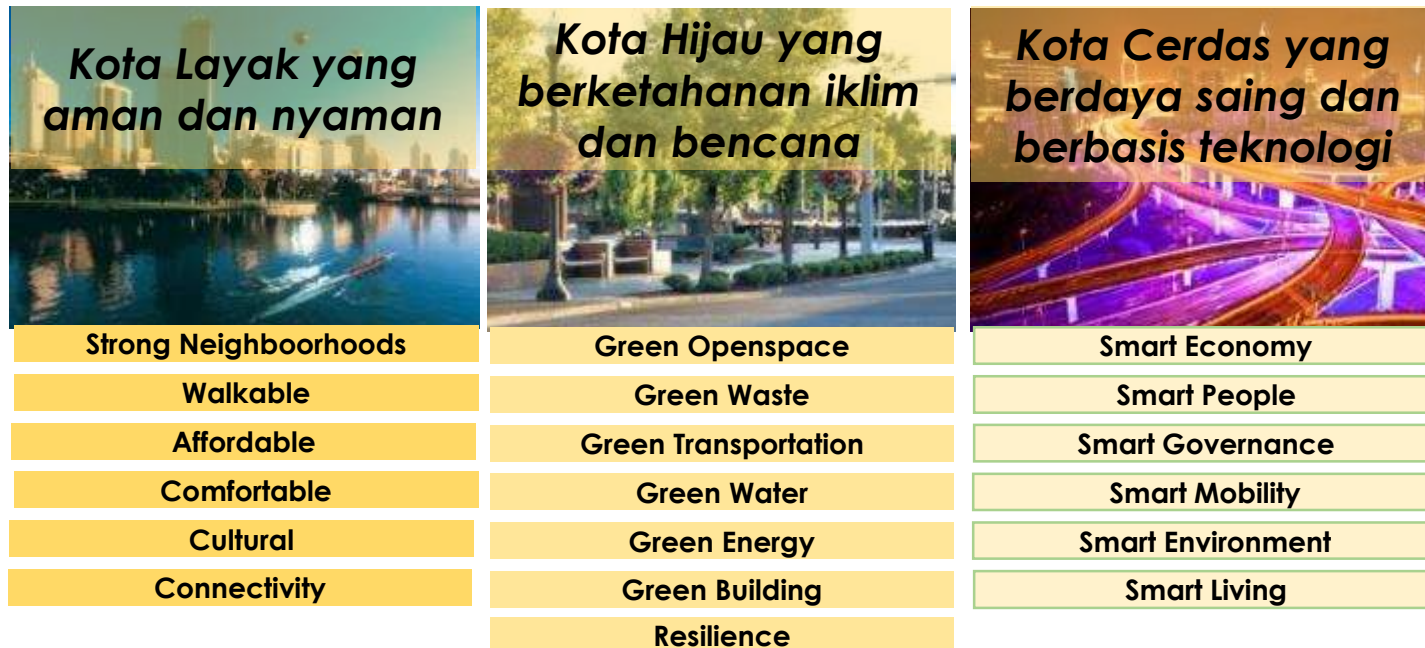


Memahami Komponen **KOTA CERDAS INDONESIA** (2)

Berbagai pihak di Indonesia pun mengeluarkan versinya masing-masing (a.l. Bappenas, Kemendagri, maupun Pemerintah Daerah)

Pilar Kota Berkelanjutan 2015-2045

Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat



Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam **SISTEM PERKOTAAN NASIONAL** berbasis kewilayahan

KOTA CERDAS INDONESIA

Kesuksesan pengembangan Kota Cerdas di Indonesia tidak terlepas dari **Kolaborasi** antar pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Universitas, Masyarakat dan Lembaga Donor serta penerapan **Smart Community** yang melibatkan peran serta masyarakat.

Kota Surabaya

Taman Bungkul Surabaya



Kampung Maspati Surabaya



Contoh (2)

KOTA CERDAS INDONESIA

Kota Bandung

Plaza Cikapundung
Bandung



Sumber gambar: Pemerintah Kota Bandung

Contoh (3)

KOTA CERDAS INDONESIA

Kota Semarang

Kota Lama Semarang



Contoh (4) KOTA CERDAS INDONESIA

DKI Jakarta



Moda Raya Terpadu (MRT)



Bus Trans Jakarta

Berbagai Forum Inklusif dalam Pembangunan Perkotaan dan Permukiman

Konsultasi Regional



Musyawarah Daerah



Workshop Asosiasi Profesi



Workshop Perguruan Tinggi



Peran Inklusif Pemerintah Daerah

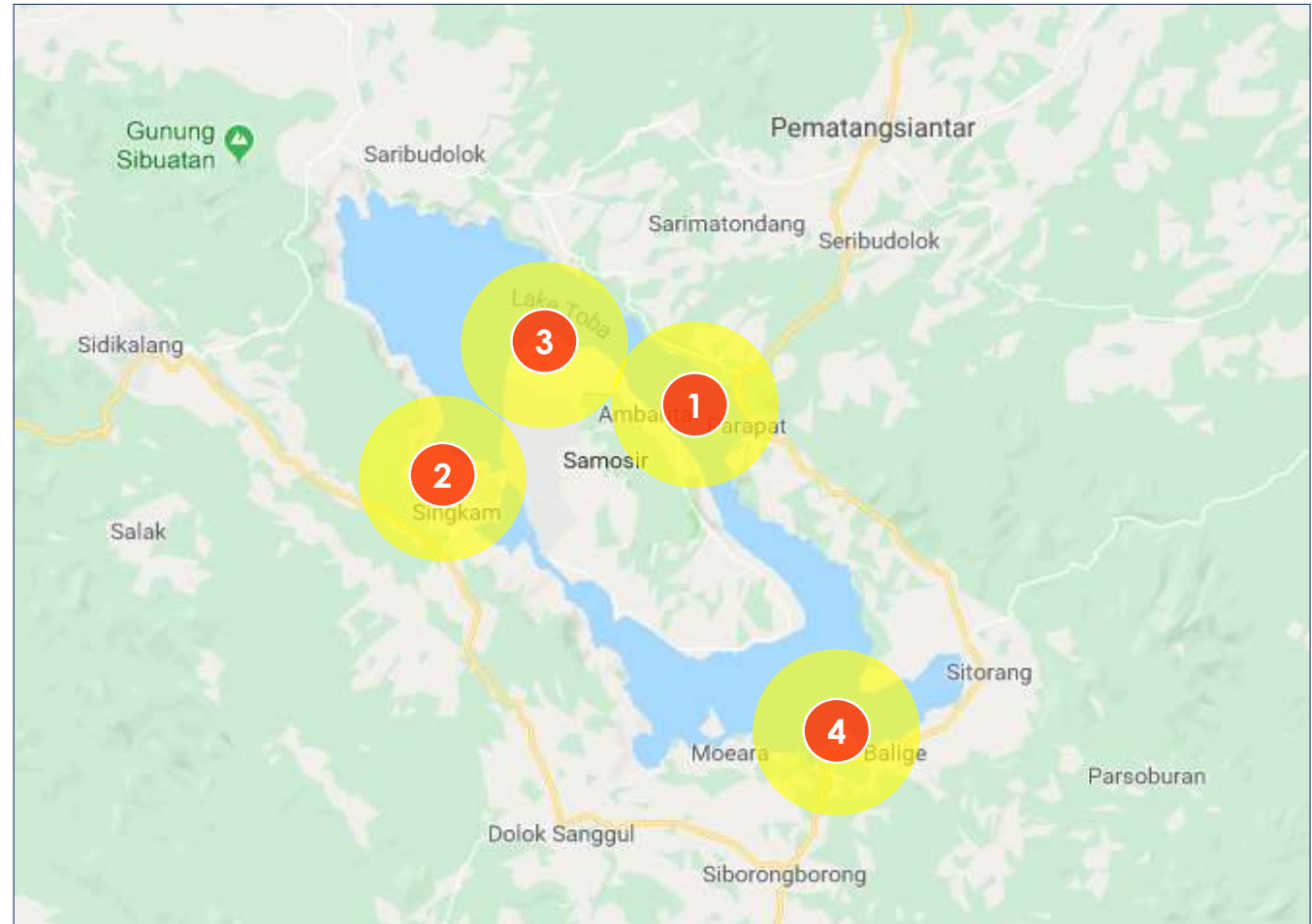
(Contoh Penanganan Danau Toba)

Cakupan Wilayah

1. Kabupaten Simalungun
2. Kabupaten Toba Samosir
3. Kabupaten Tapanuli Utara
4. Kabupaten Humbang
Hasundutan
5. Kabupaten Dairi
6. Kabupaten Karo
7. Kabupaten Samosir
8. Kabupaten Pakpak Bharat

Key Priority Area

1. Parapat, Kecamatan Girsang
Sipangan Bolon, Kabupaten
Simalungun
2. Kecamatan Simanindo, Kabupaten
Samosir
3. Kecamatan Pangururan,
Kabupaten Samosir
4. Kecamatan Balige, Kabupaten
Toba Samosir





5

Penutup

Penutup

- ❑ Urbanisasi perlu dikelola dengan baik karena tidak dapat dihindari; Urbanisasi perlu dilihat sebagai peluang, bukan ancaman.
- ❑ Perlu pembangunan perkotaan dan permukiman yang inklusif dengan melibatkan berbagai *stakeholders* (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, masyarakat, swasta dan lembaga donor).
- ❑ Perlu pembangunan wilayah perkotaan secara inklusif yang lintas batas administrasi kota.

Terima Kasih....

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

